

Peranan Kesejahteraan Sosial dalam Program Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Tahun 2022

Natanael Robby Saputra¹, Sri Suwartiningsih², Alvianto Wahyudi Utomo³

^{1,2,3}Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

E-mail: 352019004@student.uksw.edu

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-11-05 Revised: 2025-12-19 Published: 2026-01-08	Through the BLT and BPNT social assistance programs, social welfare plays a role in community service in Ledok Village, Argomulyo District. This study aims to explain the function of social welfare in Ledok Village, Argomulyo District, Salatiga City, through the BLT and BPNT social assistance programs. Data for this study were collected through interviews and observations using qualitative methodology. Midgley's theory with the original role component was applied in this study. Residents of Ledok District, Argomulyo District, Salatiga City, now feel safe and calm thanks to the successful implementation of the BLT (Direct Cash Assistance) and Non-Cash Food Assistance (BPNT) social welfare assistance programs.
Keywords: <i>The Role of Social Welfare; Community Service Programs.</i>	
Artikel Info Sejarah Artikel Diterima: 2025-11-05 Direvisi: 2025-12-19 Dipublikasi: 2026-01-08	Abstrak Melalui program bantuan sosial BLT dan BPNT, kesejahteraan sosial berperan dalam pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi kesejahteraan sosial di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, melalui program bantuan sosial BLT dan BPNT. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi menggunakan metodologi kualitatif. Teori Midgley dengan komponen peran asli diterapkan dalam penelitian ini. Warga Kecamatan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, kini merasa aman dan tenang berkat suksesnya pelaksanaan program bantuan kesejahteraan sosial BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kata kunci: <i>Peran Kesejahteraan Sosial; Program Pelayanan Masyarakat.</i>	

I. PENDAHULUAN

Persoalan Program Kesejahteraan Sosial Masyarakat perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena kesejahteraan sosial masyarakat selalu menjadi faktor utama dan terpenting dalam suatu negara. Mengingat Indonesia memiliki salah satu populasi terbesar, maka diperlukan lebih banyak pembangunan untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya (Yuniati, 2019). Oleh karena itu, tanggung jawab utama pemerintah sebagai pemimpin negara adalah untuk memajukan kesejahteraan penduduk dan menjamin bahwa setiap orang dapat menikmati tingkat kehidupan minimum yang layak bagi semua orang. Fokus perhatian telah bergeser pada kesejahteraan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, dengan kesejahteraan sosial yang paling banyak mendapat perhatian. Fokus utama seharusnya pada kesejahteraan sosial karena keberadaan masyarakat sangatlah penting, di mana masyarakat memegang peranan penting dalam memenuhi kewajibannya terhadap pembangunan negara. Negara memiliki kewajiban melalui pemerintahan untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya, fungsi ini dijalankan oleh pemerintah dalam bentuk program pembangunan

dan pemberdayaan sosial. Pelayanan publik pada hakikatnya mencakup berbagai macam bidang kehidupan. Peran pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah memberikan berbagai macam pelayanan kepada masyarakat, mulai dari peraturan perundang-undangan atau pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti kesejahteraan, kehidupan yang layak, kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam hal pelayanan publik dan birokrasi pemerintahan, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, kecamatan merupakan wilayah kerja camat dan merupakan perangkat daerah kabupaten dan kota. Pemerintahan dapat mengelola pembagian otonomi sedemikian rupa sehingga arah kebijakannya jelas dalam proses desentralisasi, maka wilayah kecamatan merupakan wilayah administrasi pemekaran daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pimpinan kecamatan dipilih langsung oleh pemerintah kabupaten dan kota. Selain itu, sekretaris kecamatan membantu dalam penyelenggarannya. Argomulyo Peningkatan pelayanan publik, koordinasi administrasi pemerintahan, dan pemberdayaan

masyarakat desa dan/atau kecamatan menjadi tanggung jawab kecamatan. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program bantuan sosial guna membantu masyarakat kurang mampu agar dapat tetap bertahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari mengingat berbagai permasalahan yang tengah dihadapi Indonesia saat ini (Fathia Karunia Nurhanifa, 2021). Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial, seperti masyarakat miskin, orang tua terlantar, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan korban bencana alam, telah ditangani oleh berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut berasal dari berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, kelompok sosial, dan masyarakat yang peduli terhadap berbagai permasalahan kemasyarakatan. Berbagai pelaksanaan penanganan telah dilakukan secara konsisten (berkelanjutan). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 2, "Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara."

Pelayanan tersebut meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, (Suhendi, 2013) Pemerintah Indonesia sangat menyadari tujuan program jaring pengaman sosial untuk membantu hanya warga yang membutuhkan (Karunia Nurhanifa et al., 2024). Melalui Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), pemerintah menawarkan bantuan pangan nontunai setiap bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam upaya agar warga dan masyarakat kurang mampu mendapatkan perlindungan sosial dan keluar dari kemiskinan (Yani Alfian1, 2022) Peranan dalam kesejahteraan Sosial dalam Program pelayanan bantuan sosial pemerintah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat KPM di Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana cara kerja kesejahteraan sosial di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, melalui program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai), sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Melalui program bantuan sosial BLT dan BPNT, penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan peran kesejahteraan sosial di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga.

II. METODE PENELITIAN

Melalui observasi dan wawancara langsung di Kecamatan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (Amantha, 2021). Menurut Sugiyono (2019), metode kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Data yang dihasilkan dalam penelitian ini mengungkap fakta, fenomena, dan kondisi sosial yang dialami masyarakat Kecamatan Ledok, Kecamatan Argomulyo, terkait peran program kesejahteraan sosial. Penelitian ini berusaha memahami secara mendalam pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap fungsi program tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong (2017) yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik dan mendalam melalui proses interpretasi terhadap data yang dikumpulkan dari latar alamiah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi, yaitu suatu pendekatan yang berupaya memahami makna pengalaman hidup individu atau kelompok terhadap suatu fenomena tertentu. Creswell (2014) menyebutkan bahwa pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggali makna dari pengalaman manusia terhadap fenomena tertentu dengan cara mendengarkan pandangan partisipan secara langsung. Sejalan dengan itu, Bungin (2020) menegaskan bahwa pendekatan fenomenologis berupaya mengungkap realitas subjektif yang dialami masyarakat berdasarkan kesadaran dan pengalaman mereka sendiri.

Unit analisis penelitian ini adalah fungsi program kesejahteraan sosial di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, dengan waktu pelaksanaan penelitian pada tahun 2024. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para informan, pengamatan langsung (observasi partisipatif) terhadap objek penelitian, serta dokumentasi untuk memperoleh data yang relevan. Menurut Nasution (2018), wawancara merupakan teknik utama dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti memperoleh data langsung dari narasumber melalui percakapan mendalam. Sedangkan observasi, menurut Spradley (2007), merupakan cara untuk

memperoleh pemahaman kontekstual terhadap perilaku dan aktivitas sosial partisipan dalam situasi alami.

Peneliti menggunakan alat bantu berupa catatan lapangan, pedoman wawancara, dan rekaman audio untuk mengumpulkan data primer, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, dokumentasi, dan sumber-sumber tertulis lain yang mendukung penelitian. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1994). Reduksi data digunakan untuk menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah menjadi data yang bermakna. Penyajian data dilakukan agar hasil penelitian lebih mudah dipahami, baik melalui uraian naratif, tabel, grafik, maupun hubungan antarkategori. Tahap akhir analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang bertujuan menemukan makna dan implikasi dari data yang telah diolah.

Dengan metode ini, peneliti berharap dapat memahami dan menjelaskan secara mendalam bagaimana masyarakat Desa Ledok, Kecamatan Argomulyo, memaknai fungsi program kesejahteraan sosial dalam kehidupan mereka sehari-hari.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi program kesejahteraan sosial dalam menawarkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat melalui berbagai taktik, kebijakan. Menurut Para ahli, Anderson (1984) menekankan bahwa tindakan pemerintah adalah kebijakan dan semua biaya dan manfaat, baik langsung maupun jangka panjang, harus diukur dalam bentuk hasil nyata atau simbolis yang menyoroti bahwa semua manfaat dan biaya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, harus diukur dalam bentuk hasil aktual atau simbolis, dan bahwa kegiatan pemerintah adalah kebijakan. (Huraerah, n.d.). Kesejahteraan digambarkan sebagai kondisi "keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan" oleh W.J.S. Poerwadarminta (1990). Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia, kesejahteraan mencakup keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan, terutama bagi mereka yang tergolong kelompok rentan dan kurang mampu (mereka yang berpotensi menjadi kurang mampu). (Suryono, n.d.). Menurut Berry (1995), seorang individu dituntut untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya di tempat kerja, Karena orang hidup dalam jaringan sistem yang saling terkait,

seperti keluarga, komunitas, lembaga sosial, dan kebijakan pemerintah, kesejahteraan sosial menawarkan sudut pandang yang komprehensif untuk memahami masalah sosial. Intervensi diperlukan (Rukmana Patty, n.d.) program dan inisiatif yang mendukung individu dalam mengelola kehidupan mereka dengan sukses. Istilah khusus "kesejahteraan sosial" dalam UUD 1945 mencakup sistem jaminan sosial, Pasal 33 tentang sistem ekonomi, dan Pasal 34 tentang perhatian negara terhadap kelompok lemah (anak-anak miskin dan terlantar). (David Nagaring & Sambiran, n.d.) Keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan dapat dikenali melalui berbagai kekurangan yang sering terjadi, seperti keterbatasan dalam akses terhadap makanan, pakaian, perumahan layak, dan air minum. Kondisi-kondisi ini secara signifikan mempengaruhi kualitas hidup mereka (Fikri Fadhilah et al., 2025)

Di negara yang pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, kemiskinan selalu menjadi masalah yang signifikan. Pendapatan rendah secara umum berdampak pada kekuatan sosial seseorang atau kelompok, terutama dalam hal menjamin keadilan atau hak yang sama bagi setiap orang untuk menjalani kehidupan yang layak. Mereka yang dianggap miskin tidak mampu menghadapi keadaan tak terduga yang memerlukan alokasi pendapatan untuk menyelesaiannya.

Misalnya, penyakit yang memerlukan biaya medis yang relatif tinggi dan bencana, seperti bencana alam, yang memerlukan pendapatan yang besar. Siregar dan Wahyuniarti (200:27) menganggap seseorang dianggap miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata orang dalam hal ekonomi. Dengan kata lain, Jika penghasilan atau cara hidup seseorang benar-benar di bawah kebutuhan minimum, mereka dianggap miskin, Karena uang merupakan kondisi ekonomi logis yang menempatkan seseorang pada kedudukan tertentu di masyarakat, Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers (2001:21) berpendapat bahwa pendapatan merupakan ukuran kesejahteraan yang paling penting dalam rangka memperkuat perekonomian. (Rizaldy, 2021) Di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, program bantuan sosial menyasar masyarakat miskin, yaitu mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Apabila pendapatan sekelompok orang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sandang,

pangan, dan papan, serta kebutuhan masyarakat dan keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup, maka mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan. Prakarsa kesejahteraan sosial mendukung sistem sosial dan ekonomi di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Perangkat daerah Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga berupaya mewujudkan peran kesejahteraan sosial bagi masyarakat melalui program kesejahteraan sosial yang berbasis pada pendataan kelompok lemah (fakir miskin dan anak terlantar) dan sistem jaminan sosial yang memungkinkan masyarakat Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, memperoleh bantuan sosial dari pemerintah. Tenaga Sosial Kesehatan Kecamatan (TKSK) merupakan penduduk desa atau kecamatan yang telah mendapatkan pelatihan atau pembinaan di bidang kesejahteraan sosial, yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial untuk secara sukarela melaksanakan tugas pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, bertugas menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat (Yudianto et al., 2021). Sehingga Kemiskinan di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Program kesejahteraan sosial di kelurahan ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan melalui pendataan kelompok lemah dan sistem jaminan sosial Pemerintah setempat berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program ini. Tenaga

Kesehatan Sosial Kecamatan (TKSK) juga berperan penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat dengan melaksanakan tugas pengabdianya secara sukarela. Peran program kesejahteraan senantiasa berkaitan dengan masyarakat dan pemerintah, salah satu peran untuk dapat memberikan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan Tenaga Sosial Kesehatan Kecamatan (TKSK) Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo yaitu program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai dan Bantuan Langsung Tunai, bantuan ini berupa beras dan uang tunai selama kurun waktu Oktober, November dan Desember dengan memberikan bantuan paling sedikit Rp300.000,- per bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain berperan penting dalam program kesejahteraan sosial yaitu penyaluran bantuan sosial, pendamping dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi program, dan diharapkan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Pendamping ini

memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk memastikan program bantuan sosial BLT dan BPNT bagi warga Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga berjalan dengan baik. Tercapainya peningkatan kesejahteraan keluarga penerima melalui program Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Pangan Non Tunai. Hingga saat ini bagian kesejahteraan sosial pada program pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga telah berjalan sesuai dengan tujuan program.

Ilmu kesejahteraan sosial, yang mempelajari bagaimana inisiatif seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Bantuan Pangan Nontunai membantu mengatasi kemiskinan, program kesejahteraan sosial, dan kapasitas penyedia kesejahteraan sosial untuk mempekerjakan sumber daya manusia Suharto (2015), Peningkatan keadilan dan penanggulangan kemiskinan memerlukan struktur kelembagaan yang mengintegrasikan metode penganggaran yang menguntungkan masyarakat miskin baik secara horizontal (antarpemerintah pusat dan daerah) maupun vertikal (antarkementerian dan lembaga).

Pada tahun 2022 jumlah masyarakat Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo, Laki-laki sebanyak 5450 dan Perempuan 5509 total masyarakat sebanyak 51376. Kesejahteraan sosial diberikan kepada masyarakat di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, melalui penyaluran bantuan pangan non tunai dan program bantuan sosial pangan Beras Sejahtera. Program kesejahteraan sosial BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Bantuan Pangan

Non Tunai memberikan bantuan kepada Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Selain itu, masyarakat mendapatkan fasilitas kesejahteraan sosial untuk kesehatan donor darah, yang diselenggarakan di kelurahan tersebut setiap tiga bulan dan melibatkan total 22 orang. Sebanyak 34 orang anggota Karang Taruna dan Limas dikerahkan secara strategis pada tahun 2022 untuk memberikan layanan sosial langsung dan tidak langsung berupa bantuan untuk mendukung kesejahteraan dan keamanan warga Kecamatan Ledok, Kecamatan Argomulyo, dan Kota Salatiga. Mereka membantu staf program kesejahteraan sosial di Desa Ledok, Kecamatan Argomulyo. Kesejahteraan sosial Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo meliputi:

1. Bantuan Pangan Non Tunai

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Kelurahan Ledok Kecamatan argomulyo pada tahun 2022 memiliki 8357 KK yang di mana 25% keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah bantuan sosial BLT diberikan dalam bentuk beras sejahtera sebanyak 30kg sebanyak 156 keluarga per RW sebagai penerima manfaat. Bantuan yang diberikan secara cuma-cuma dan diberikan kepada masyarakat di RW masing-masing ini bertujuan untuk meringankan beban keuangan dan meningkatkan gizi masyarakat Desa Ledok, Kecamatan Argomulyo, khususnya bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2. Bantuan Langsung Tunai

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) memberikan bantuan kepada Rumah Penerima Manfaat (KPM) minimal Rp300.000 per bulan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2022, yang diberikan kepada 21 rumah di setiap RW di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo. Bantuan ini mendukung dan berdampak signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, khususnya bagi kelompok marginal dan kurang mampu. BLT memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama dalam meringankan beban ekonomi, khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah. Dengan bantuan ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain itu, BLT juga meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong perputaran ekonomi lokal, serta menjadi bentuk nyata kehadiran dan kepedulian pemerintah terhadap warganya yang sedang mengalami kesulitan. Bantuan ini juga membantu mencegah peningkatan angka kemiskinan dan memberikan rasa aman serta harapan bagi penerimanya. Banyak keluarga penerima bantuan yang mampu bertahan dari tekanan keuangan berkat BLT, yang juga membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai penyedia jaminan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dan keluarga di wilayah Kecamatan Ledok, Kecamatan Argomulyo yang menerima BLT termasuk mereka yang mengalami keadaan seperti kehilangan pekerjaan atau pendapatan tidak tetap, serta para lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga dengan anak

berkebutuhan khusus yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan bahwa pada tahun 2022 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, memainkan peran penting dalam menjalankan program bantuan sosial. Program ini meliputi Bantuan Non Tunai dan Bantuan Langsung Tunai. Mengingat 25% dari 8357 Keluarga dengan kondisi ekonomi terendah adanya program kesejahteraan sosial BLT dan BPNT ini masyarakat sangat terbantu. Keberadaan Tenaga Kesehatan Sosial Kecamatan juga memfasilitasi penyaluran program kesejahteraan sosial. Peran kesejahteraan sosial dalam program bantuan BLT dan BPNT untuk meningkatkan kualitas hidup, membuat mereka lebih mandiri, berkualitas dan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat dengan demikian, Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab utama dari bagian kesejahteraan sosial di Desa Ledok, Kecamatan Argomulyo.

B. Saran

Pemerintah Kelurahan Ledok diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas penyaluran program bantuan sosial seperti BLT dan BPNT agar lebih tepat sasaran serta memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan perlu memperkuat pendampingan kepada keluarga penerima manfaat agar bantuan yang diterima tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Masyarakat penerima bantuan diharapkan dapat memanfaatkan program kesejahteraan sosial dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberfungsian sosial. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan wilayah dan variabel yang lebih beragam agar hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas program kesejahteraan sosial di tingkat lokal.

DAFTAR RUJUKAN

- Amantha, G. K. (2021). *Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 67–79.
<https://doi.org/10.33701/jipwp.v4i1.1490>
- Amantha, R. (2021). *Metode penelitian sosial kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bungin, B. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- David Nagaring, D., & Sambiran, S. (2021). *Peran pemerintah dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Manado (studi di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)*. *Jurnal Governance*, 1(2).
- Fathia Karunia Nurhanifa, A. (2021). *Peran bantuan sosial program keluarga*.
- Fikri Fadhilah, M., Sumpena, D., & Djati, G. (2025). *Peranan pusat kesejahteraan sosial dalam pelayanan pengaduan masyarakat miskin*. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10.
- Huraerah, A. (n.d.). *Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia: Policy strategy of tackling poverty in Indonesia*.
- Karunia Nurhanifa, F., Studi Pendidikan Masyarakat, P., Siliwangi, I., & Barat, J. (2024). *Peranan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Cijedil Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur*. *Jurnal Comm-Edu*, 7(1), 2615–1480.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2018). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Rizaldy, B. R. (2021). *Dampak kebijakan program Bantuan Langsung Tunai terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa*.
- Rukmana Patty, S. (n.d.). *Pengantar ilmu kesejahteraan sosial*.
- Spradley, J. P. (2007). *Participant observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto. (2015). *Peran perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia: Studi kasus Program Keluarga Harapan*. *Sosiohumaniora*, 17(1), 22.
- Suhendi, A. (2013). *The role of local community leaders in social welfare development*, 18(2).
- Suryono, A. (n.d.). *Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat*.
- Yani Alfian, C. I. A. (2022). *Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pendampingan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung*.
- Yudianto, E., Jurusan, Y., & Publik, A. (2021). *Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam mendampingi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo*. *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, & Ilmu Sosial (Publicio)*, 3(1).
- Yuniati, Y. (2019). *Pancasila sebagai sumber nilai tertinggi bagi peningkatan dan perkembangan*. *Jurnal Ekonomedia*.